

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Siti Aisyah (2025) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong” Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangkiling belum efektif. Hal ini dilihat dari lima sub-variabel: *Pertama*, pemahaman program, di mana indikator sosialisasi belum efektif karena tidak pernah dilaksanakan, dan indikator pemahaman materi belum efektif karena peserta kurang memahami pembelajaran, meskipun indikator pemahaman tujuan sudah efektif. *Kedua*, tepat sasaran, di mana indikator kesesuaian program dan objek pemberdayaan sudah efektif. *Ketiga*, tepat waktu, di mana indikator pelaksanaan sudah efektif, namun indikator penyelesaian belum efektif karena waktu yang tersedia kurang maksimal untuk menyerap ilmu. *Keempat*, tercapainya tujuan, di mana indikator pencapaian tujuan dan keberlanjutan pelatihan belum efektif karena minimnya usaha berkelanjutan. *Kelima*, perubahan nyata, di mana indikator adanya perubahan dalam membantu ekonomi peserta dan peningkatan kesejahteraan belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi dua. Faktor pendukung adalah adanya dana yang dianggarkan untuk melaksanakan pelatihan. Adapun faktor penghambat adalah kurangnya

motivasi dalam diri peserta pelatihan dan tidak adanya modal untuk memulai serta mengembangkan usaha. Disarankan kepada pemerintah desa agar melakukan sosialisasi program, merencanakan waktu penyelesaian secara optimal, menyediakan akses terhadap bahan atau alat pasca-pelatihan, membangun sistem pendampingan dan monitoring, serta menjalin kemitraan untuk akses pasar. Peserta pelatihan diharapkan lebih tekun dan aktif memberikan timbal balik. Diperlukan pula pemantauan dari berbagai pihak untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Fachrul Auza'I (2019) "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan salah satu yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang ada di Daerah. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Program PMB-RW dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui Analisis Deskriptif dengan mendeskripsikan gambaran senyatanya dari fenomena dan pengelolaan Program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan

dokumentasi. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian bahwa Efektivitas Program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya khususnya Pemberdayaan Ekonomi Belum Efektif dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya, belum efektif karena disebabkan beberapa faktor diantaranya, kurang antusias masyarakat terlibat program pemberdayaan ekonomi yang dibuat, keterbatasan dana masyarakat, belum merata mendapatkan pelatihan berkaitan pemberdayaan ekonomi, kurang sosialisasi dan waktu pelatihan yang diberikan, pelaksanaan dilapangan belum sesuai waktu dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Effendy dalam Muhammad Sawir (2020: 125) mendefinisikan efektivitas “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Menurut Komaruddin dalam Mutiarin dan Arif (2021: 96), “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan anajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.

Menurut Mahmudi dalam Diana Hertati (2019: 22) “Efektivitas adalah hubungan *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan”.

Menurut Ravianto dalam Abadi Joko dkk (2022: 8) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan, program, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana tingkat keberhasilan ini dinilai dari sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

b. Aspek-Aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh dalam Panguliman dkk (2018: 5) ada 4 aspek efektivitas yaitu:

- 1) Aspek Tugas dan Fungsi
Yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas

dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta belajar dengan baik.

2) Aspek Rencana atau Program

Yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif.

3) Aspek Ketentuan dan Peraturan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan peserta, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

4) Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi atau hasil yang dicapai.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Gie dalam Zahrah dan Arifin (2021: 1150), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

- 1) Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas itu dikerjakan maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
- 2) Tugas, bawahan harus diberikan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan pada mereka.
- 3) Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas yang baik, demikian pula sebaliknya.
- 4) Motivasi pimpinan dapat mendorong bawahannya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitive. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
- 5) Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan bantuan informasi kepada bawahannya, harus melakukan dengan baik atau tidak.
- 6) Pengawasan, dengan adanya pengawasan, maka kinerja pegawai dapat terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas.

- 7) Lingkungan tempat kerja, menyangka tata ruang cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai dalam bekerja.
- 8) Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

d. Pengukuran Efektivitas

Menurut Budiani dalam Dedi Amrizal dkk (2018: 59-60) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) Ketepatan Sasaran Program
Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi Program
Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan Program
Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan Program
Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Gibson dalam Diana Hertati (2019: 23-24) menyebutkan ukuran efektivitas yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah diterapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi, seperti penentuan wawasan waktu, dampak, dan pemusatan upaya.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya, kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut

harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- 4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan sehingga tujuan organisasi tercapai.

2. Program

Kata “program” dapat memiliki berbagai arti tergantung pada konteksnya. Beberapa pengertian umum dari kata “program” antara lain: rencana atau rancangan, seri instruksi kegiatan, rangkaian tindakan atau kebijakan, serangkaian kegiatan, bahkan dalam dunia teknologi program disebut perangkat lunak atau sistem komputer. Makna kata “program” sangat tergantung pada konteks penggunaannya.

Program dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan. Sebuah program berasal dari suatu kegiatan yang memiliki perencanaan yang matang untuk dilakukan. Sanjaya, et.al, dalam Otaya dkk (2025: 2) menyatakan bahwa program merupakan kegiatan yang direncanakan secara terperinci dan dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan suatu pengaruh yang positif bagi

orang lain. Dampak positif tersebut dapat berupa kesejahteraan, kesuksesan serta wawasan yang semakin diperluas.

Menurut Ananda dalam Islami dkk (2021: 182) menjelaskan bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa program selalu melibatkan perencanaan terperinci dan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai dampak positif atau tujuan tertentu dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Menurut Suharto dalam Hutagalung (2022: 20) “pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan”.

Menurut Slamet dalam Hutagalung (2022: 20-21) menekankan bahwa hakikat “Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri”.

b. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syakara* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).

Menurut Soekanto dalam Hutagalung (2022: 30) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas.

c. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya yang disengaja yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam melaksanakan tugas-tugas ketenagakerjaan yang spesifik untuk kegiatan ekonomi.

Menurut Tjiptoherjanto dalam Chalida Hanoum, dkk (2024: 83) menjelaskan “Pelatihan merupakan inisiatif strategis penting yang secara signifikan meningkatkan kinerja dan keterampilan karyawan. Pelatihan sangat penting bagi setiap organisasi dan di semua industri, karena peningkatan pendidikan dan pelatihan, bersama dengan peningkatan motivasi, secara langsung berkorelasi dengan peningkatan produktivitas kerja”. Mathis dalam Sutisna dkk (2020: 64) mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuannya. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan. Secara terbatas, pelatihan menyediakan dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.

Sementara dalam intruksi presiden No. 15 tahun 1974, menjelaskan Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Pelatihan yang ada di Desa Takulat terdiri dari Las Listrik, Instalasi Listrik dan Pengolahan Kue. Syarat-syarat untuk mendaftar dengan membawa KTP domisili Desa Takulat dan Kartu Keluarga saja. Dengan syarat tersebut masyarakat otomatis sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan karena tidak adanya sistem seleksi ataupun test. Pelatihan dimulai dari jam 09.00-13.00 yang bertempat di halaman Kantor Desa Takulat.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam memandirikan masyarakat.

Menurut Chambers dalam Pakpahan dkk (2024: 2) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dalam pembangunan perekonomian melalui pengintegrasian nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Konsep pemberdayaan merupakan pandangan baru dalam pembangunan yaitu memiliki sifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”

Prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Zuraidah dalam Pakpahan dkk (2024: 10-12) yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pemberdayaan yaitu:

- a. Tidak ada paksaan dan pelaksanaannya demokratis. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh ada unsur pemaksaan karena setiap orang berbeda baik dari bakat, minat maupun potensi. Oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan sama untuk setiap orang.
- b. Kebutuhan dan potensi merupakan pondasi dari kegiatan pemberdayaan karena setiap individu pada prinsipnya mempunyai keinginan dan keunggulan diri sehingga pemberdayaan akan diawali dengan menumbuhkan potensi dan keinginan sehingga pada akhirnya akan terbentuk masyarakat dan warga yang mandiri.
- c. Masyarakat menjadi pelaku dan subjek utama pemberdayaan sehingga dalam menentukan sasaran, pendekatan, serta kegiatan pemberdayaan seharusnya didasarkan pada kehendak bersama masyarakat itu sendiri.
- d. Perlu di tumbuhkan kembali kearifan lokal pada masyarakat. Nilai dan budaya sebagai nilai luhur dan hal ini merupakan jati diri masyarakat sehingga dijadikan modal sosial dalam pembangunan.
- e. Masyarakat jangan berhenti belajar sehingga potensi yang ada di dalam dirinya dapat bertumbuh. Belajar sepanjang hayat (*life long learning education*), belajar di manapun, kapan pun dan dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia di lingkungan sekitar (bahan, alat, teknik).

- f. Keragaman budaya sangat perlu diperhatikan di dalam pemberdayaan karena hal ini akan meningkatkan toleransi dan menyadarkan kita bahwa kita berada di lingkungan yang beragam baik suku, agama, bahasa maupun budaya.
- g. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif. Kegiatan partisipatif diawali dengan kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan output pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dapat diperkuat dengan (1) memperkuat kebersamaan, empati dan gotong royong; (2) memperkuat jaringan dan (3) kemampuan membangun partisipasi di pusat maupun daerah.
- h. Sasaran dari pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat dengan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha serta kemandirian. Masyarakat pada masa global ini memerlukan orang-orang yang mempunyai semangat untuk membangun jaringan, menumbuhkan peluang, memiliki kemauan untuk mengambil resiko serta banyak melakukan inovasi.
- i. Seorang agen perubahan harus dapat membangkitkan motivasi, kemampuan mengikuti perkembangan zaman khususnya kemampuan digital

Tujuan pemberdayaan menurut Suaib (2023: 31) adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktursosial yang tidak adil). Guna memahami tentang pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dengan ketidakberdayaan yang dialaminya.

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dalam Simson Ginting dkk (2022: 15), adalah:

- a. Perbaikan kelembagaan, dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan, dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan lingkungan, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat, kehidupan lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, di antaranya melalui pendayagunaan potensi lingkungan. Menurut Suyono dalam Hutagalung (2022: 22), Paling tidak ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan.
- b. Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak termasuk masyarakat tentang hal-hal apa, di mana, dan siapa yang akan diberdayakan.
- c. Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan”.

Khotijah dalam Pakpahan dkk (2024: 35) menyatakan bahwa tahapan pemberdayaan Masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yakni Pertama : Tahap persiapan, yakni: Musyawarah, survei lapangan, observasi dan wawancara. Kedua: Tahap pengkajian, yaitu pemilihan

prioritas asset yang diunggulkan. Ketiga: Tahap rencana aksi, yaitu Mengadakan sosialisasi. Keempat: Tahap Implementasi, yakni training dan *launching product* dan Kelima: Tahap terminasi.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Arti kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari kata “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Kata “kesejahteraan” sendiri diambil dari kata dasar “sejahtera” yang menunjukkan suatu kondisi yang mencerminkan kondisi positif, yaitu keadaan dimana anggotanya hidup sejahtera, sehat dan damai. Sedangkan “masyarakat” mengacu pada sekelompok individu yang mempunyai ikatan kuat melalui sistem, tradisi, konvensi dan hukum yang sama, dan mengarah pada kehidupan bersama.

Kesejahteraan masyarakat Indonesia dinilai berdasarkan delapan indikator utama, yaitu:

- a. Pertama, indikator kependudukan adalah penting untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik karena mencakup elemen seperti pertumbuhan populasi, distribusi penduduk, dan struktur usia.
- b. Kedua, indikator kesehatan dan gizi mengukur tingkat harapan hidup, akses ke layanan kesehatan, dan status gizi penduduk, termasuk prevalensi penyakit dan akses ke air bersih.
- c. Ketiga, indikator pendidikan mencakup partisipasi siswa dalam pendidikan, tingkat melek huruf, dan kualitas pendidikan.
- d. Keempat, ketersediaan pekerjaan yang layak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena

ketenagakerjaan menilai tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja.

- e. Kelima, taraf dan pola konsumsi membahas pendapatan per kapita dan bagaimana masyarakat membeli barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif meningkatkan daya beli.
- f. Keenam, indikator perumahan dan lingkungan mengukur berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- g. Ketujuh, indikator kemiskinan mengukur berapa banyak orang yang memiliki akses ke perumahan yang layak, sanitasi, kondisi lingkungan yang sehat dan penyediaan perumahan berkualitas sangat penting untuk kesejahteraan.
- h. Terakhir, pengukuran sosial lainnya termasuk akses ke keadilan, keamanan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana penguatan jaringan sosial juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa, “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, ditemukan beberapa fenomena masalah yang akan dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan Menurut Budiani dalam Dedi Amrizal dkk (2018: 59-60) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan Program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

